



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HARIS ACHADI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **403798**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.729.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 488.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 291.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI 414 F DX (4X2) MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.733.450**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 161.098.604**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.054.332.054**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.054.332.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.